



► Respons Perlindungan Sosial

Tanggal: 23 April 2020

► Respons perlindungan sosial terhadap krisis COVID-19: Respons negara-negara dan pertimbangan kebijakan

Poin utama

- Pandemi COVID-19 mewakili tantangan besar dalam kesehatan masyarakat dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang serius. Pemerintah menghadapi tantangan ganda: mereka harus menangani pandemi kesehatan, sementara pada saat bersamaan merespons dampak ekonomi dan sosialnya.
- Sistem perlindungan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari respons kebijakan terkoordinasi terhadap krisis yang sedang berlangsung, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara efektif sekaligus menjamin keamanan pekerjaan dan pendapatan bagi mereka yang paling terdampak. Sistem perlindungan sosial ini meningkatkan ketahanan, berkontribusi terhadap pencegahan kemiskinan, pengangguran dan informalitas serta menjadi stabilisator ekonomi dan sosial yang kuat agar dapat mendorong pemulihan yang cepat.
- Negara-negara yang telah memiliki sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang efektif yang memberikan cakupan universal, lebih siap untuk merespons krisis. Landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional yang menjamin akses ke layanan kesehatan dan setidaknya jaminan pendapatan tingkat dasar sepanjang hayat sangatlah penting.
- Dialog sosial dan konsultasi dengan mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam membentuk respons kebijakan terkoordinasi tersebut.
- Negara dengan sistem kesehatan dan perlindungan sosial yang kuat dapat bereaksi dengan cepat dengan meningkatkan mekanisme perlindungan yang ada dan dengan memperluas serta menyesuaikannya agar dapat mencakup populasi yang sebelumnya tidak tercakup.
- Negara yang tidak memiliki sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang cukup kuat harus diberi bantuan internasional untuk memastikan respons cepat yang memadai terhadap krisis.
- Negara harus memprioritaskan bantuan bagi mereka yang sangat rentan terhadap krisis, termasuk pekerja sektor informal; memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, termasuk akses ke layanan kesehatan dan bantuan finansial.
- Krisis ini telah mempercepat reformasi perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan dengan memaksa pemerintah untuk sementara memperluas perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok yang semula belum tercakup dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan luar biasa.
- Pemerintah bersama dengan mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya, harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di negara mereka, termasuk landasan-landasannya, sebagai pijakan arsitektur kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

Peran kunci sistem perlindungan sosial dalam merespons krisis COVID-19¹

Pandemi COVID-19 mewakili tantangan besar dalam kesehatan masyarakat dan akan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang serius. Pertumbuhan global diproyeksikan berkontraksi tajam sebesar -3 persen pada 2020 (IMF 2020), pendapatan global dapat berkurang US\$ 2 triliun (UNCTAD 2020) dan jam kerja diperkirakan menurun 6,7 persen pada kuartal kedua tahun 2020, yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu, yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan secara signifikan (ILO 2020a). Perkiraan-perkiraan tersebut menunjukkan bahwa krisis ini dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan global secara signifikan yang berpotensi menghapus satu dasawarsa penurunan kemiskinan (Sumner, Hoy dan Ortiz-Juarez, 2020). Jika situasi terus memburuk, dampak krisis dapat menjadi lebih menyedihkan.

Pemerintah menghadapi tantangan ganda: Mereka harus menangani pandemi kesehatan, sementara pada saat bersamaan harus merespons dampak ekonomi dan sosialnya. Di luar kehilangan nyawa manusia yang tragis akibat virus itu sendiri, krisis ini berpotensi menimbulkan kerugian sangat besar pada manusia dalam aspek lain dan dapat meningkatkan kemiskinan serta ketidaksetaraan yang berdampak sangat buruk bagi para lansia, penyandang disabilitas dan penyakit kronis, pekerja migran dan orang-orang yang terlanjar (Diwakar 2020). Banyak anak dan perempuan akan terdampak buruk oleh akibat pandemi ini terhadap masyarakat dan ekonomi (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020). Namun, negara-negara sebenarnya sangat berdaya dan memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menangani dan mengurangi dampak krisis ini.

Sistem perlindungan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari respons kebijakan terkoordinasi terhadap krisis yang sedang berlangsung, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara efektif sekaligus menjamin keamanan pekerjaan dan pendapatan bagi mereka yang paling terdampak. Sistem perlindungan sosial tersebut meningkatkan ketahanan, berkontribusi untuk mencegah kemiskinan, pengangguran dan informalitas serta menjadi stabilisator ekonomi dan sosial yang kuat sehingga membantu pemulihan yang cepat (ILO 2020b; SPIAC-B, 2020).² Dengan memadukan intervensi kesehatan dengan langkah-langkah perlindungan sosial, pemerintah dapat merespons krisis secara efektif.³

Untuk melakukannya, terutama bagi negara-negara dengan komposisi sektor informal yang besar, memperluas perlindungan kepada mereka yang belum tercakup harus menjadi inti kebijakan (ILO 2020c; FAO, 2020). Dialog sosial dan konsultasi dengan mitra sosial dan pemangku kepentingan lain sangat penting dalam perumusan respons kebijakan terkoordinasi tersebut.

Krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa negara yang memiliki sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang efektif dan memberi cakupan universal lebih siap untuk menanggapi krisis COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya. Mereka memiliki kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan sistem secara cepat dalam menanggapi krisis (ILO 2019d, 2017). Dalam hal ini, landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional yang menjamin akses ke layanan kesehatan dan keamanan pendapatan tingkat dasar sepanjang hidup sangat penting. Demikian juga, negara yang telah mengupayakan kebijakan fiskal *countercyclical* yang bertanggung jawab di masa lalu – mengakumulasi surplus ketika ekonomi kuat – cenderung berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk merespons penurunan dan memberikan peningkatan perlindungan sosial melalui stimulus fiskal.

Namun, negara yang tidak memiliki sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat perlu mengembangkan kebijakan dan intervensi secara *ad hoc*, membangun kapasitas kelembagaan dalam keadaan yang sulit, sehingga kemungkinan akan menghasilkan respons yang terbatas dan lambat. Dalam kasus semacam itu, bantuan internasional akan sangat penting untuk melengkapi upaya negara dalam mengadopsi langkah-langkah darurat guna meningkatkan kapasitas sistem kesehatan, memperluas ruang fiskal dan membangun kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menghindari krisis kesehatan yang dramatis.

Karena situasi yang semakin memburuk, krisis COVID-19 berpotensi menggagalkan kemajuan ekonomi dan sosial di banyak negara, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mereka. Pada saat yang sama, pandemi ini memberikan kesempatan dan dorongan agar negara-negara memprioritaskan investasi pada sistem perlindungan kesehatan dan sosial guna membantu mencegah atau mengurangi krisis, dan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial mereka agar lebih dapat mengatasi tantangan di masa depan.

¹ Penafian: Karena keadaan luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi kesehatan global ini, telah ada kegiatan intens dalam respons nasional dan karenanya tidak semua informasi yang terkandung dalam dokumen ini dapat sepenuhnya dikonfirmasi dengan menggunakan perundang-undangan resmi atau buletin hukum.

² Pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan dan ekonomi tahun 2008 mengungkapkan peran kunci perlindungan sosial dalam menstabilkan pendapatan rumah tangga dan permintaan agregat, serta berkontribusi terhadap pemulihan. Misalnya, perluasan program perlindungan sosial di Amerika Serikat diperkirakan memiliki dampak pengganda yang signifikan terhadap keluarannya, sementara paket stimulus fiskal Australia, yang mencakup komponen perlindungan sosial yang kuat, berperan penting dalam mencegah kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3 persen antara tahun 2008 dan 2009 (OECD 2009; ILO 2010, 2014, 2017).

³ Pelajaran yang dipetik dari wabah epidemi sebelumnya, misalnya wabah SARS, MERS dan Ebola, menunjukkan bahwa kurangnya langkah-langkah perlindungan sosial dalam konteks epidemi kesehatan memperburuk kemiskinan, pengangguran dan informalitas, yang mengarah pada lingkaran kerapuhan yang lebih besar.

Respons kebijakan perlindungan sosial terhadap krisis COVID-19

Respons kebijakan perlindungan sosial nasional terhadap krisis COVID-19 mencakup berbagai bidang.⁴ Pemantau Perlindungan Sosial ILO mencatat 548 langkah perlindungan sosial yang dilakukan 108 negara dan wilayah antara periode 1 Februari dan 17 April 2020. Langkah-langkah tersebut mencakup beberapa bidang perlindungan sosial (lihat gambar 1).

Berikut ini beberapa bidang kebijakan prioritas, termasuk contoh-contoh negara⁵ dan tautan ke informasi yang lebih terperinci.

Akses ke layanan kesehatan

Sebagai respons terhadap krisis COVID-19, banyak negara mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, menutup kesenjangan dalam perlindungan kesehatan dan sosial, serta memperluas perlindungan keuangan, termasuk dengan:

- menyalurkan sumber daya fiskal tambahan ke dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas layanan kesehatan untuk semua;
- meningkatkan koordinasi dalam sistem kesehatan, termasuk kapasitas kelembagaan dan staf, dengan peran sentral untuk pengadaan publik, kadang-kadang dilengkapi oleh penyedia layanan swasta berdasarkan peraturan publik (Spanyol, Inggris);
- mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, pengujian dan layanan (termasuk telemedis) dalam paket tunjangan layanan kesehatan (Tiongkok); dan
- meningkatkan perlindungan finansial terhadap biaya layanan kesehatan, menjaga dan memperluas cakupan mekanisme perlindungan kesehatan sosial yang ada, dan memastikan universalitas dan keberlanjutan⁶ cakupan, misalnya menjamin layanan kesehatan untuk warga asing (Thailand).

Tunjangan sakit: memastikan jaminan pendapatan selama cuti sakit

Krisis COVID-19 telah mengekspos kesenjangan dalam cakupan tunjangan sakit, membuat sejumlah besar pekerja, misalnya pekerja mandiri dan pekerja sektor informal, tidak memiliki cuti sakit berbayar (OECD 2020; ILO 2017; ISSA 2020b). Hal ini menjadi tantangan bagi kesehatan dan jaminan pendapatan masyarakat karena pekerja yang tidak dapat mengandalkan tunjangan sakit dan/atau hak cuti sakit berbayar mungkin terpaksa harus bekerja saat sakit atau mungkin enggan melakukan isolasi mandiri, sehingga berpotensi menularkan virus kepada kolega dan klien.

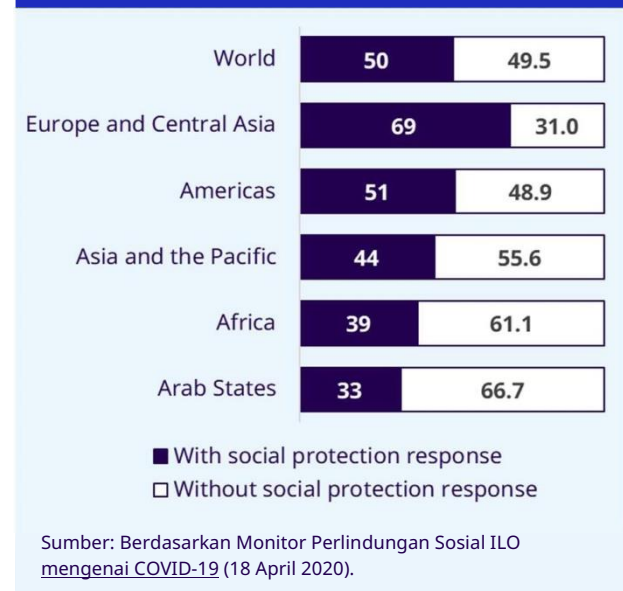
Perlindungan ini sangat mendesak karena berdampak pada banyak pekerja di garis depan krisis COVID-19, misalnya pekerja kesehatan, pekerja kebersihan, pekerja transportasi dan kurir dan pekerja rumah tangga. Banyak negara mengambil langkah darurat untuk menutup celah perlindungan melalui berbagai langkah, termasuk dengan:⁷

- memperluas tunjangan sakit yang dibiayai dari pajak kepada pekerja yang tidak mendapatkan hak cuti sakit dibayar (Jerman, Irlandia, Portugal, Inggris);
- memastikan pembayaran tunjangan sakit bagi mereka yang dikarantina atau menjalani isolasi mandiri (Austria, Perancis, Jerman, Inggris, Vietnam);
- menghapuskan masa tunggu untuk pembayaran tunjangan sakit (Australia, Kanada, Portugal); dan
- membebaskan persyaratan untuk menyerahkan surat keterangan sakit (Austria, Jepang).

Perlindungan pengangguran: Mencegah kehilangan pekerjaan dan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan

Skema perlindungan pengangguran menjadi alat utama untuk mengatasi dampak buruk dalam bidang ketenagakerjaan dari krisis ini, yang telah mengancam jutaan pekerjaan (ILO 2020a; OECD 2020; ISSA 2020). Perlindungan ini mencakup langkah-langkah untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerja, yang pada gilirannya mencegah pengangguran, serta langkah-langkah untuk memberikan jaminan pendapatan bagi pekerja menganggur, misalnya dengan:

Gambar 1: Persentase negara dengan dan tanpa respons perlindungan sosial menurut kawasan



⁴ Tinjauan yang lebih rinci tentang respons negara yang diumumkan tersedia di [Monitor Perlindungan Sosial ILO mengenai COVID-19](#), lihat juga Gentilini, Almenfi, dan Orton (2020), ISSA (2020a) dan OECD (2020).

⁵ Contoh negara yang diberikan tidak merepresentasikan daftar lengkap.

⁶ Dengan tujuan untuk memastikan, khususnya, mereka yang memiliki skema yang disponsori oleh pengusaha tidak akan kehilangan perlindungan setelah kehilangan pekerjaan atau penghasilan.

⁷ Untuk rincian lebih lanjut, lihat ILO (akan datang (a)).

- membantu perusahaan mempertahankan pekerja melalui tunjangan kerja jangka pendek/tunjangan pengangguran parsial (Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, California (Amerika Serikat), Thailand);
- memfasilitasi akses ke tunjangan pengangguran bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membantu mereka dalam mencari pekerjaan baru, yang dalam beberapa kasus juga memperluas tunjangan pengangguran ini kepada pekerja mandiri (Australia, Irlandia, Filipina);
- memberikan bantuan darurat satu kali bagi pekerja yang diberhentikan yang tidak memenuhi syarat untuk asuransi pengangguran (Australia, Italia, Jepang);
- mengoordinasikan perlindungan pengangguran dengan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke layanan ketenagakerjaan, termasuk pencocokan pekerjaan, pengembangan keterampilan dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk membantu pencari kerja dalam mencari pekerjaan baru (Hongkong (Cina), Republik Korea), termasuk melalui konseling kerja dan mediasi kerja daring (Belgia, Estonia).

Tunjangan hari tua, ahli waris dan disabilitas

Mengingat kerentanan lansia dan penyandang disabilitas, tunjangan hari tua, ahli waris dan disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jaminan pendapatan bagi mereka yang terdampak krisis, misalnya dengan:

- memajukan pembayaran tunjangan hari tua dan disabilitas dan/atau meningkatkan tingkatannya untuk menjamin setidaknya pencegahan kemiskinan (Argentina, Peru, Ukraina);
- memastikan akses yang efektif ke layanan kesehatan, tunjangan disabilitas dan tunjangan perlindungan sosial lainnya yang memadai bagi para penyandang disabilitas (Argentina, Hongkong (Cina), Peru, Singapura);
- memastikan akses berkelanjutan ke tunjangan disabilitas, layanan, dan bantuan untuk penyandang disabilitas (Australia, Perancis);
- meminimalkan risiko kontaminasi untuk lansia saat mengambil uang pensiun mereka di titik pembayaran pensiun (Peru).⁸

Memberikan tunjangan pendapatan melalui bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan bantuan lain

Mengingat dampak ekonomi akibat krisis COVID-19 yang dengan cepat semakin dalam, banyak pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk memberikan bantuan pendapatan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau tunjangan lain yang dibiayai pajak, termasuk dengan:⁹

- meningkatkan bantuan sosial untuk penerima manfaat yang ada dengan memajukan waktu pembayaran tunjangan dan/atau meningkatkan tingkatnya (Australia, Brasil, Tiongkok, Malaysia);
- merelaksasi kriteria kelayakan untuk memperluas cakupan (Irlandia, Inggris);

- menyesuaikan modalitas atau persyaratan skema bantuan sosial, misalnya persyaratan berkenaan dengan pencarian kerja (Australia) dan memfasilitasi akses ke bantuan sosial untuk penerima manfaat baru (Irlandia, Selandia Baru);
- Tunjangan pendapatan umum untuk semua penduduk melalui pembayaran satu kali (Hongkong (Cina), Singapura);
- memberikan tunjangan tunai dan non-tunai lain, misalnya makanan (India, Jamaika) atau bantuan langsung tunai untuk memastikan akses ke makanan (Distrik Federal (Brasil), Indonesia); dan
- bantuan tambahan untuk masyarakat yang sangat rentan, misalnya tuna wisma (El Salvador, Perancis, Spanyol).

Kebijakan cuti untuk perawatan keluarga

Dengan penutupan sekolah, universitas dan layanan pengasuhan anak di lebih dari 100 negara yang berdampak pada lebih dari 800 juta anak dan remaja (UNESCO 2020), kebijakan cuti keluarga perlu menjadi perhatian (UNICEF, ILO dan UN Women 2020). Kebijakan semacam itu sangat penting untuk membantu mereka yang tidak dapat bekerja jarak jauh dalam situasi ketika banyak struktur pendukung ditutup. Kebijakan meliputi:

- memperkenalkan atau memperluas cuti keluarga khusus untuk mendukung orang tua bekerja yang terdampak oleh penutupan sekolah (Perancis, Italia), mensubsidi pengusaha untuk memberikan cuti keluarga berbayar (Jepang) atau memberikan bantuan langsung tunai atau kupon pengasuhan anak atau layanan anak lainnya, terutama bagi pekerja layanan kesehatan (Italia, Polandia, Portugal, Republik Korea);
- mempertahankan fasilitas pengasuhan anak untuk anak-anak pekerja layanan kesehatan (Austria, Perancis, Belanda); dan
- membantu mereka yang merawat orang tua yang mungkin sangat rentan terhadap virus korona.

Memodifikasi sementara pembayaran iuran jaminan sosial dan pembayaran pajak untuk perusahaan

Untuk mengurangi kendala likuiditas yang dihadapi oleh perusahaan, banyak negara untuk sementara menangguhkan pembayaran iuran jaminan sosial dan pajak atau mengambil langkah-langkah lain untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal ini (OECD 2020; ILO 2020c). Kendati langkah-langkah semacam itu dapat memberikan bantuan jangka pendek bagi perusahaan yang terdampak, penting diingat bagi perusahaan agar tidak merusak keberlanjutan fiskal anggaran pemerintah dan lembaga-lembaga jaminan sosial di masa depan, terutama saat sistem perlindungan sosial mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- memperbolehkan perusahaan menunda pembayaran iuran asuransi sosial dan pajak (Tiongkok, Perancis, Hongaria, Thailand, Vietnam).

⁸ Untuk rincian lebih lanjut, lihat SIFAR, University of East Anglia, dan Helpage International (2020).

⁹ Untuk rincian lebih lanjut, lihat ILO (akan datang (b)) dan Gentilini, Almenfi, dan Orton (2020).

- menangguhkan pajak tertentu pada perusahaan kecil dan meniadakan langkah penegakan dan sanksi keterlambatan pembayaran (Jerman, Inggris).

Menyesuaikan prosedur administratif dan mekanisme penyampaian

COVID-19 juga memiliki implikasi penting terhadap cara tunjangan dan layanan dikelola dan disampaikan. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- mempercepat pengurusan permohonan atau pengurusan klaim dan pencairan tunjangan yang mengikutinya (Australia, Kanada, Inggris);
- menghapus persyaratan kunjungan langsung dan mendorong penggunaan layanan daring (Tiongkok, Irlandia, Inggris), dengan bantuan yang diberikan melalui telepon kepada mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi daring;
- menyesuaikan modalitas pembayaran untuk menghindari kerumunan dan risiko yang lebih tinggi di titik pembayaran (Afrika Selatan).

Pertimbangan kebijakan

Pandemi COVID-19 merupakan pengingat bahwa di dunia yang saling terhubung ini, kelemahan dalam sistem perlindungan kesehatan dan sosial suatu negara dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat di mana pun. Ketidakesetaraan kesehatan global harus menjadi prioritas. Dengan demikian, krisis ini sekali lagi meminta perhatian pada pentingnya memastikan akses universal ke sistem perlindungan sosial yang memberikan tunjangan komprehensif dan memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara-negara yang dalam beberapa dasawarsa terakhir menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam membangun sistem perlindungan kesehatan dan sosial universal cenderung berada pada posisi yang lebih kuat untuk menanggapi krisis COVID-19, sementara negara lain akan diingatkan akan pentingnya memperkuat sistem mereka agar lebih mampu mengatasi krisis saat ini dan di masa depan. Standar jaminan sosial ILO memberikan panduan penting dalam hal ini (lihat kotak 1).

Laporan baru ini harus mengarah pada peningkatan kerja sama global untuk adopsi sistem perlindungan sosial universal di mana pun. Beberapa pengamatan dan rekomendasi kebijakan dapat ditarik dari krisis ini.

Memperkuat perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan respons krisis terkoordinasi

Agar sistem perlindungan sosial dapat berperan dalam kebijakan respons krisis terkoordinasi, berikut beberapa pertimbangan penting:

- Negara dengan sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat dapat bereaksi dengan cepat dengan meningkatkan mekanisme perlindungan yang ada dan dengan memperluas dan menyesuainya untuk mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak tercakup.
- Negara yang tidak memiliki sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang cukup kuat harus diberi bantuan internasional untuk memastikan respons cepat yang memadai terhadap krisis (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020).

Kotak 1: Standar jaminan sosial ILO dan relevansinya dengan respons krisis COVID-19

Standar jaminan sosial ILO, serta standar-standar terkait, menetapkan prinsip-prinsip dasar dan parameter utama untuk mewujudkan hak asasi manusia atas jaminan sosial. Standar-standar tersebut merupakan hasil dari konsensus tripartit internasional dan dimaksudkan untuk memastikan stabilitas dan tata kelola sistem perlindungan sosial nasional yang baik, memungkinkannya pemberian layanan medis dan jaminan pendapatan yang memadai sepanjang hidup masyarakat (ILO 2017, 2019d, 2019a). Standar-standar tersebut berperan penting dalam memandu langkah-langkah tanggapan dan memastikan perlindungan bagi semua yang membutuhkan. Standar-standar tersebut didasarkan pada pengakuan jaminan sosial sebagai hak individu dan tanggung jawab umum Negara untuk menjamin pemberian tunjangan yang memadai dan memastikan keberlanjutan sistem perlindungan sosial. Memang, di seluruh dunia, Negara-negara telah melangkah untuk menata respons terhadap krisis saat ini melalui upaya melindungi masyarakat dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari krisis ini.

Agar Negara-negara dapat melaksanakan tanggung jawab umum ini secara efektif, standar ILO menyerukan mereka agar “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk tujuan ini” pada waktu yang tepat. Menyadari hak universal atas jaminan sosial menuntut setiap orang memiliki akses ke layanan medis dan jaminan pendapatan jika dan ketika dibutuhkan, memberikan prioritas kepada mereka yang sangat rentan. Pada saat yang sama, Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memulihkan kelangsungan jangka panjang sistem perlindungan sosial, termasuk, begitu kondisi memungkinkan, dengan melunasi utang-utang sebelumnya yang dikontrak oleh Negara dan mempertimbangkan alokasi anggaran yang cukup untuk menutupi komitmen Negara di masa depan terhadap jaminan sosial. Partisipasi perwakilan orang yang dilindungi dan pengusaha dalam keputusan ini penting.

Standar yang relevan meliputi Konvensi Jaminan Sosial ILO (Standar Minimum), 1952 (No. 102), Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202) dan Rekomendasi Pekerjaan yang Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan, 2017 (No. 205).

Rekomendasi 205 menyerukan para Anggota agar melakukan hal-hal berikut secepat mungkin dalam menanggapi situasi krisis:

- berupaya memastikan jaminan pendapatan dasar, khususnya bagi orang yang pekerjaan atau mata pencariannya terganggu oleh krisis;
- mengembangkan, memulihkan atau meningkatkan skema jaminan sosial komprehensif dan mekanisme perlindungan sosial lainnya, dengan mempertimbangkan undang-undang nasional dan perjanjian internasional; dan
- berupaya memastikan akses efektif ke layanan kesehatan esensial dan layanan sosial dasar lainnya, khususnya untuk kelompok masyarakat dan perorangan yang menjadi sangat rentan oleh krisis.

Rekomendasi ini juga menyatakan bahwa guna mencegah krisis, memungkinkan pemulihan, dan membangun ketahanan, negara anggota harus menetapkan, menetapkan kembali atau mempertahankan landasan perlindungan sosial serta berupaya menutup kesenjangan dalam cakupan mereka, dengan mempertimbangkan Konvensi No. 102, Rekomendasi No. 202 dan standar ketenagakerjaan internasional lain yang relevan.

- Negara harus memprioritaskan bantuan bagi mereka yang sangat rentan terhadap krisis, termasuk pekerja sektor informal; harus memastikan bahwa kebutuhan mendesak mereka terpenuhi, termasuk akses ke layanan kesehatan dan bantuan pendapatan; dan juga harus mengambil langkah-langkah praktis, misalnya menyediakan makanan dan sabun atau membuat tempat cuci tangan di ruang publik (Alfers 2020).
- Perlindungan sosial bukan sekadar respons sementara, yang berupa jaring pengaman residual, sementara dan terfragmentasi sebagai tambahan solusi pasar bagi mereka yang mampu menjangkaunya: kebijakan respons krisis juga harus berkontribusi dalam mewujudkan cakupan kesehatan universal dan membangun sistem perlindungan sosial universal, termasuk landasan, sesuai dengan target SDG 1.3 dan 3.8 (PBB 2019; USP2030 2019; ILO 2019d).
- Efektivitas respons krisis tergantung pada dialog sosial yang berkelanjutan dan partisipasi dari mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi penyebab dan konsekuensi krisis serta memastikan respons cepat yang mendorong pemulihan dan stabilitas sosial (ILO 2020a): mengingat dampak signifikan krisis terhadap pekerja dan keluarga mereka serta bisnis, tanggung jawab bersama akan berkontribusi untuk menjaga stabilitas (IOE dan ITUC 2020).
- Mempertimbangkan bahwa perempuan dan anak perempuan sangat terdampak oleh krisis, memastikan kebijakan yang responsif terhadap gender sangat penting.
- Respons perlindungan sosial terhadap krisis COVID-19 harus dikoordinasikan dengan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya, termasuk kebijakan pasar tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan yang mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja.

Memastikan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan dan adil di saat krisis dan setelahnya

Sistem perlindungan sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya untuk menanggapi krisis COVID-19, namun perlu juga dipertimbangkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Khususnya:

- Sistem perlindungan sosial yang kuat memiliki penyangga keuangan untuk menangani tantangan ganda, yaitu meningkatnya pengeluaran dan menurunnya pendapatan, namun krisis berskala besar mungkin memerlukan alokasi dana tambahan yang signifikan untuk perlindungan sosial guna memastikan penyediaan tunjangan dan layanan yang memadai dan komprehensif bagi semua orang yang membutuhkannya. Setelah dampak langsung dari krisis berlalu, penyangga keuangan ini perlu diisi ulang melalui struktur pembiayaan yang berkelanjutan dan adil, biasanya menggunakan kombinasi pajak dan iuran asuransi sosial serta kerangka kebijakan ekonomi makro yang dapat mengakomodasi.
- Di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan sosial dan kesehatan yang cukup kuat, upaya lebih lanjut akan diperlukan untuk memastikan respons krisis yang cepat dan investasi yang diperlukan untuk membangun sistem perlindungan sosial mereka.

Untuk sebagian negara, bantuan eksternal sementara mungkin diperlukan untuk memastikan adanya investasi yang diperlukan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta memperluas ruang fiskal mereka untuk membangun sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat (IMF 2019).

- Ketika pemerintah menyusun paket stimulus fiskal, mereka harus mengusahakan keseimbangan dalam memberikan bantuan keuangan yang proporsional kepada perusahaan untuk mempertahankan pekerja mereka serta bantuan pendapatan dan layanan ketenagakerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, terdapat kebutuhan perlindungan sosial lain, termasuk tunjangan sakit (terutama bagi mereka yang tidak mendapat cuti sakit berbayar wajib), bantuan sosial, dan – yang paling penting – dalam memastikan akses yang efektif ke layanan kesehatan.
- Pengalaman dari krisis terdahulu menunjukkan bahwa tanda-tanda pertama pemulihan kerap kali disertai dengan seruan penghematan dan konsolidasi fiskal yang dapat merusak kemajuan yang telah dibuat. Sangat penting bagi negara untuk mempertahankan langkah-langkah perlindungan sosial dan pengeluaran sosial mereka ketika krisis kesehatan mulai mereda guna memastikan masyarakat dilindungi dari konsekuensi ekonomi dan sosial merugikan yang mungkin terjadi seiring waktu serta krisis di masa depan. Selain itu, karena langkah-langkah respons krisis telah mencakup penangguhan sementara atau pengurangan iuran asuransi sosial dan pajak, langkah-langkah yang tepat perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan keuangan sistem perlindungan sosial sembari menjamin kecukupan tunjangan.

Mempersiapkan masa depan

Krisis COVID-19 berfungsi sebagai seruan dengan mengekspos kesenjangan dalam sistem perlindungan sosial di seluruh dunia. Pemerintah bersama dengan mitra sosial dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil kesempatan ini untuk memperkuat sistem perlindungan sosial mereka, termasuk landasan sebagai pijakan arsitektur kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Khususnya:

- Keunggulan komparatif sebuah sistem perlindungan sosial universal yang menjangkau semua orang adalah bahwa sistem tersebut secara otomatis siap untuk melindungi semua yang terdampak guncangan. Bantuan langsung perlindungan sosial dapat ditingkatkan dengan cepat dan dengan administrasi yang relatif mudah. Dalam krisis yang kompleks, bergerak cepat dan tidak terduga seperti COVID-19, universalisme lebih disukai dibandingkan pendekatan tersasar. Ini terutama bila kapasitas penargetan terbatas dan proporsi penduduk rentan sangat tinggi. Universalisme secara praktis lebih masuk akal dibandingkan upaya ad hoc yang dinilai “secara efektif” tersasar, meski keterbatasan pendekatan ini telah terdokumentasikan dengan baik.
- Sangat penting bahwa sistem perlindungan sosial dipersiapkan dengan baik untuk menanggapi krisis, baik yang terkait dengan epidemi, perubahan iklim atau guncangan ekonomi. Dibutuhkan investasi berkelanjutan dalam perluasan jangkauan dan

kecukupan sistem perlindungan sosial universal¹⁰ dan memastikan bahwa sistem tersebut memiliki dasar hukum dan kebijakan nasional serta dibiayai dengan cara yang adil dan berkelanjutan yang didasarkan pada pengumpulan risiko dan solidaritas yang luas. Standar jaminan sosial internasional memberikan panduan penting dalam hal ini (ILO 2019a).

- Krisis ini telah memperbarui kesadaran publik dan politik tentang pentingnya perlindungan sosial dan bahwa layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai harus tersedia untuk semua dalam menghadapi guncangan seperti pandemi kesehatan. Krisis ini menyerukan perlunya menegaskan kembali prinsip-prinsip solidaritas sosial yang mendukung perlindungan sosial universal dan sentralitasnya untuk memastikan masyarakat yang adil secara sosial (ILO 2019e).
- Krisis COVID-19 telah mengungkap konsekuensi mengkhawatirkan kesenjangan cakupan dan kecukupan dalam perlindungan sosial untuk beberapa kategori pekerja, misalnya pekerja paruh waktu, pekerja sementara dan pekerja mandiri. Krisis ini menyoroti pentingnya memastikan memadainya cakupan perlindungan sosial bagi pekerja dalam semua bentuk ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan keadaan mereka, sejalan dengan standar jaminan sosial internasional dan Deklarasi Seabad ILO untuk Pekerjaan Masa Depan¹¹. Ini terutama terkait tunjangan yang memiliki cakupan rendah dan seringkali diabaikan, misalnya tunjangan sakit dan perlindungan pengangguran. Krisis ini telah mempercepat reformasi yang sangat dibutuhkan dengan memaksa banyak pemerintah untuk sementara memperluas perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok yang belum terjangkau dengan memperkenalkan langkah-langkah dan perundang-undangan luar biasa. Ke depan, langkah-langkah sementara harus ditransformasikan menjadi mekanisme perlindungan sosial berkelanjutan bagi kategori-kategori pekerja ini berdasarkan pembagian biaya yang adil antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, yang memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial (ILO 2016, 2019b; OECD 2018, 2019, 2020a). Ini adalah langkah penting untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan mendukung transisi dari perekonomian informal ke formal.

Perlindungan sosial harus dilihat sebagai investasi dan bukan sebagai biaya tambahan. Krisis terdahulu telah menegaskan peran vital perlindungan sosial sebagai penyangga sosial dan stabilisator ekonomi yang terpadu bagi kelancaran dan keberhasilan fungsi masyarakat. Peran positif perlindungan sosial sebagai alat penting untuk mengurangi dampak negatif dari guncangan sudah ditetapkan. Jika mendapat dukungan memadai dalam krisis ini, nilainya akan ditekankan sekali lagi.

Referensi

- Alfers, Laura. 2020. 'Pandemic: Informal Workers Urgently Need Income Replacement — and More Protections'. *Empowering Informal Workers, Securing Informal Livelihoods* (blog). 23 Maret 2020.
- Diwakar, Vidya. 2020. 'From Pandemics to Poverty: The Implications of Coronavirus for the Furthest Behind'. ODI. 3 Oktober 2020.
- FAO. 2020. 'Social Protection and COVID-19 Response in Rural Areas'. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gentilini, Ugo, Mohamed Almenfi, and Ian Orton. 2020. 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures (Diperbarui 10 April)'.
<https://www.ilo.org/public/eng/mediacentre/pressreleases/20200410-social-protection-and-jobs-responses-to-covid-19-a-real-time-review-of-country-measures>
- Global Commission on the Future of Work. 2019. 'Work for a Brighter Future'. Jenewa: International Labour Office.
- ILO. 2010. 'World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in the Time of Crisis and Beyond'. Jenewa: International Labour Office.
- . 2014. 'World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice'. Jenewa: International Labour Office.
- . 2016. 'Non-Standard Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2017. 'World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2019a. 'Building Social Protection Systems: International Standards and Human Rights Instruments'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2019b. 'Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2019c. 'Extending Social Security to the Self-Employed: Lessons from International Experience'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2019d. 'Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable Development: General Survey Concerning the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2019e. 'Universal Social Protection: Key Concepts and International Framework'. Social Protection for All Issue Brief. Jenewa: International Labour Office. <https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55517>.
- . 2020a. 'ILO Monitor 2nd Edition: COVID-19 and the World of Work Updated Estimates and Analysis'. Jenewa: International Labour Organization.
- . 2020b. 'COVID-19 and World of Work: Impacts and Responses'. Jenewa: International Labour Organization..
- . 2020c. 'Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific'. Bangkok and Jenewa: International Labour Organization

¹⁰ [Global Partnership for Universal Social Protection \(USP2030\)](https://www.ilo.org/public/eng/mediacentre/pressreleases/20200410-social-protection-and-jobs-responses-to-covid-19-a-real-time-review-of-country-measures) mendukung negara-negara untuk merancang dan menerapkan sistem perlindungan sosial universal dan berkelanjutan, sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya target SDG 1.3.

¹¹ Lihat juga Global Commission on the Future of Work (2019); ILO (2019c).

- . forthcoming (a). 'COVID 19 Health Crisis: The Need for Sickness Benefit during Sick Leave and Quarantine'. Jenewa: International Labour Organization.
- . forthcoming (b). 'Non-contributory benefits in the COVID-19 crisis: Country responses and policy considerations'. Jenewa: International Labour Organization.
- IMF. 2019. 'A Strategy for IMF Engagement on Social Spending'. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- . 2020. World Economic Outlook (April), Washington D.C.: International Monetary Fund.
- IOE and ITUC. 2020. 'Joint Statement on COVID-19'. International Organization of Employers and International Trade Union Confederation.
- ISSA. 2020a. 'Coronavirus – Social Security Responses', Jenewa: International Social Security Association.
- . 2020b. 'COVID-19 Crisis: A Renewed Attention to Sickness Benefits', International Social Security Association.
- OECD. 2009. 'Employment Outlook: Tackling the Jobs Crisis.' Paris.
- . 2018. 'The Future of Social Protection: What Works for Non-Standard Workers?' Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- . 2019. 'The Future of Work: OECD Employment Outlook 2019'. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- . 2020. 'Supporting People and Companies to Deal with the Covid-19 Virus: Options for an Immediate Employment and Social-Policy Response'. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- SIFAR, University of East Anglia, and Helpage International. 2020. 'Guidelines on Administering Pension Payments in the Context of the COVID-19 Pandemic'.
- SPIAC-B. 2020. 'A Joint Statement on the Role of Social Protection in Responding to the COVID-19 Pandemic'. New York: Social Protection Inter-agency Cooperation Board.
- Sumner, Andy, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez. 2020. 'Estimates Of The Impact Of Covid-19 On Global Poverty', WIDER Working Paper 2020/43, Helsinki: UNU-WIDER.
- UNCTAD. 2020. 'Coronavirus: Can Policymakers Avert a Trillion-Dollar Crisis?' Jenewa: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNESCO. 2020. 'COVID-19 Educational Disruption and Response'. UNESCO. 18 Maret 2020.
- UNICEF, ILO, and UN Women. 2020. 'Family-Friendly Policies and Other Good Workplace Practices in the Context of COVID-19: Key Steps Employers Can Take'. New York and Jenewa: United Nations Children's Fund, International Labour Organization, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- United Nations. 2019. 'Political Declaration of the High-Level Meeting on Universal Health Coverage "Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World (A/RES/74/2)". United Nations General Assembly.
- . 2020. 'Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of COVID-19'. New York: United Nations.
- USP2030. 2019. 'Together to Achieve Universal Social Protection by 2030 (USP2030) – A Call to Action'. Jenewa: Global Partnership for Universal Social Protection.

Departemen Perlindungan Sosial ILO

- Kontak: socpro@ilo.org
- Situs web ILO: www.ilo.org
- Platform Perlindungan Sosial: www.social-protection.org

Lihat situs web kami untuk pembaruan rutin dari respons dunia kerja terhadap krisis COVID-19.

- ilo.org/global/topics/coronavirus
- www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62&lang=EN